

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang pesat, sehingga tingkat persaingan antarperusahaan semakin intens. Hingga November 2024, tercatat sebanyak 912 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Bursa Efek Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pasar modal Indonesia. Kondisi ini mendorong setiap perusahaan untuk berupaya memperoleh laba yang maksimal dengan mengoptimalkan kinerja manajemen. Manajemen dituntut untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien agar perusahaan tidak hanya mampu bertahan dan menjaga eksistensinya di tengah persaingan, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham (R. Sari & Darmawati, 2021).

Laporan keuangan merupakan salah satu alat utama bagi perusahaan untuk menyajikan informasi terkait kinerja keuangan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, regulator, dan masyarakat luas. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 201 (Revisi 2018) tentang Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Di antara berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi mengenai laba menjadi aspek yang

paling mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan digunakan sebagai dasar untuk menilai akuntabilitas manajemen atas kinerjanya.

Laba merupakan pengukuran kinerja yang paling sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Investor menggunakan informasi laba untuk menilai profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, kreditor menggunakannya untuk menilai kemampuan membayar utang, sedangkan manajemen menggunakan laba sebagai tolok ukur pencapaian kinerja (Sulistyanto, 2021). Manajemen sering kali berupaya menampilkan laba yang stabil dari waktu ke waktu untuk menghindari persepsi negatif pasar terhadap fluktuasi kinerja keuangan. Kecenderungan para pemangku kepentingan, terutama investor, yang lebih memperhatikan informasi laba menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang terlihat stabil. Dalam praktiknya, tekanan untuk menjaga kestabilan laba dapat mendorong manajemen melakukan tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan, salah satunya melalui praktik *Income smoothing* atau perataan laba (Fadhilah & Luthan, 2023).

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk praktik manajemen laba (*earnings management*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba dari satu periode ke periode berikutnya agar terlihat lebih stabil dan konsisten di mata investor, kreditor, maupun publik (Toni *et al.*, 2021:20). Praktik ini dilakukan dengan cara menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan dan beban, memilih metode akuntansi tertentu, atau melakukan pengaturan estimasi akuntansi yang masih sesuai dengan

standar pelaporan keuangan yang berlaku (Fadhilah & Luthan, 2023). Praktik *income smoothing* juga berkaitan erat dengan fleksibilitas yang diberikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 208 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 208 memberikan ruang bagi manajemen dalam menentukan estimasi akuntansi dan memilih kebijakan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Fleksibilitas ini, meskipun bertujuan meningkatkan relevansi laporan keuangan, dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan perataan laba melalui pengaturan estimasi seperti penyisihan piutang, depresiasi aset, dan provisi lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018b).

Menurut Herawati *et al.*, (2025) *income smoothing* biasanya dilakukan oleh manajemen untuk menampilkan kinerja yang baik dan menjaga persepsi positif dari pemangku kepentingan. Perusahaan dengan laba yang stabil cenderung dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan kinerja yang lebih terukur, sehingga dapat menarik minat investor dan menjaga kestabilan harga saham. Namun, meskipun praktik ini sering dianggap legal karena masih berada dalam batas kebijakan akuntansi yang diperbolehkan, *income smoothing* dapat mengurangi kualitas laba karena informasi yang disajikan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Sari & Kristianti, 2022).

Dampak negatif dari praktik *income smoothing* telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian. Menurut Sulistyanto (2021) praktik *income smoothing* dapat mengurangi relevansi dan reliabilitas informasi akuntansi, menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi, dan menurunkan kepercayaan publik

terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian Baek *et al.*, (2020) menemukan bahwa kemampuan manajerial yang tinggi dapat memfasilitasi praktik perataan laba yang lebih efektif, namun hal ini justru dapat menurunkan kualitas informasi akuntansi bagi pengguna eksternal. Lebih lanjut, penelitian Puspita & Yusuf (2021) menunjukkan bahwa praktik *income smoothing* berkorelasi negatif dengan kualitas audit dan dapat meningkatkan risiko terjadinya fraud dalam pelaporan keuangan.

Salah satu kelompok perusahaan yang memiliki peran strategis dan signifikan di pasar modal Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga tahun 2024, terdapat 32 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), mencakup berbagai sektor seperti keuangan, infrastruktur, energi, pertambangan, telekomunikasi, dan transportasi (BUMN, 2025). Variasi sektor dan skala operasi BUMN ini menciptakan dinamika internal yang kompleks dalam pengambilan keputusan pelaporan keuangan, termasuk kemungkinan melakukan *income smoothing*.

Perusahaan BUMN memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan perusahaan swasta. BUMN menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial (*agent of development and agent of social*), sehingga memiliki tanggung jawab ganda dalam operasionalnya (Nurdin & Cahyono, 2020). Dengan tanggung jawab ganda tersebut, stabilitas kinerja keuangan menjadi sangat penting, baik untuk menjaga kepercayaan investor maupun untuk mempertahankan legitimasi sebagai entitas publik yang mewakili kepentingan negara.

Sebagai perusahaan yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, BUMN memiliki tekanan besar untuk terus mencatatkan laba yang stabil.

Berdasarkan data Kementerian BUMN (2024), kontribusi dividen BUMN terhadap APBN mencapai Rp60,3 triliun pada tahun 2023, menunjukkan peran penting BUMN dalam pembiayaan pembangunan nasional. Rahayu & Arsyik (2020) mengemukakan bahwa stabilitas laba BUMN berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, BUMN juga tidak terlepas dari potensi melakukan *income smoothing* untuk menjaga citra keuangan yang baik di mata pemangku kepentingan.

Fenomena praktik *income smoothing* masih menjadi isu signifikan di lingkungan BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan tuntutan untuk menampilkan kinerja keuangan yang stabil. Beberapa kasus yang terungkap ke publik menunjukkan adanya indikasi praktik manipulasi laporan keuangan, tidak hanya pada BUMN tetapi juga pada perusahaan publik lainnya di Indonesia.

Praktik *income smoothing* pada perusahaan BUMN di Indonesia telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kasus PT Garuda Indonesia yang terungkap pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, manajemen PT Garuda Indonesia terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018 dengan mengakui pendapatan yang belum direalisasikan sebesar USD 239,94 juta dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, sehingga mengubah rugi bersih menjadi laba bersih USD 809.000. Kasus ini berujung pada pemberian sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa denda sebesar Rp100 juta kepada perusahaan dan masing-masing direksi serta komisaris yang terlibat, serta suspensi sementara terhadap dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan

tersebut (Siaran Pers OJK, 28 Juni 2019, SP-65/DHMS/OJK/VI/2019). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun BUMN memiliki sistem tata kelola yang seharusnya lebih ketat, tekanan untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik dapat mendorong manajemen melakukan praktik perataan laba yang melanggar prinsip pelaporan keuangan yang sehat.

Selain PT Garuda Indonesia, indikasi praktik *income smoothing* juga teridentifikasi pada beberapa BUMN lainnya melalui analisis pola pelaporan laba. Kasus PT Kalbe Farma Tbk periode 2017-2019 menjadi contoh bagaimana praktik *earnings management* dapat terjadi pada perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Berdasarkan penelitian Wulandari & Wirakusuma (2021), ditemukan indikasi praktik manajemen laba pada PT Kalbe Farma yang ditandai dengan pola laba yang cenderung stabil meskipun terdapat fluktuasi kondisi operasional perusahaan. Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya manipulasi akrual diskresioner yang digunakan untuk meratakan laba selama periode 2017-2019, yang kemudian mempengaruhi kualitas informasi laba yang dilaporkan kepada investor (Wulandari & Wirakusuma, 2021). Praktik ini dilakukan untuk mempertahankan citra perusahaan sebagai entitas yang memiliki kinerja stabil dan dapat diandalkan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil penelitian empiris juga mendukung indikasi adanya praktik *income smoothing* yang signifikan pada perusahaan BUMN. Penelitian yang dilakukan oleh Firdiansyah (2023) menemukan bahwa 45% BUMN terdaftar di BEI periode 2017–2021 melakukan perataan laba berdasarkan indeks eckel. Perhitungan indeks eckel untuk periode 2020–2024 juga menunjukkan pola fluktuatif, di mana pada 2020

praktik *smoothing* masih cukup tinggi, namun mulai menurun menjadi 44% pada 2021, 38% pada 2022, dan 35% pada 2023.

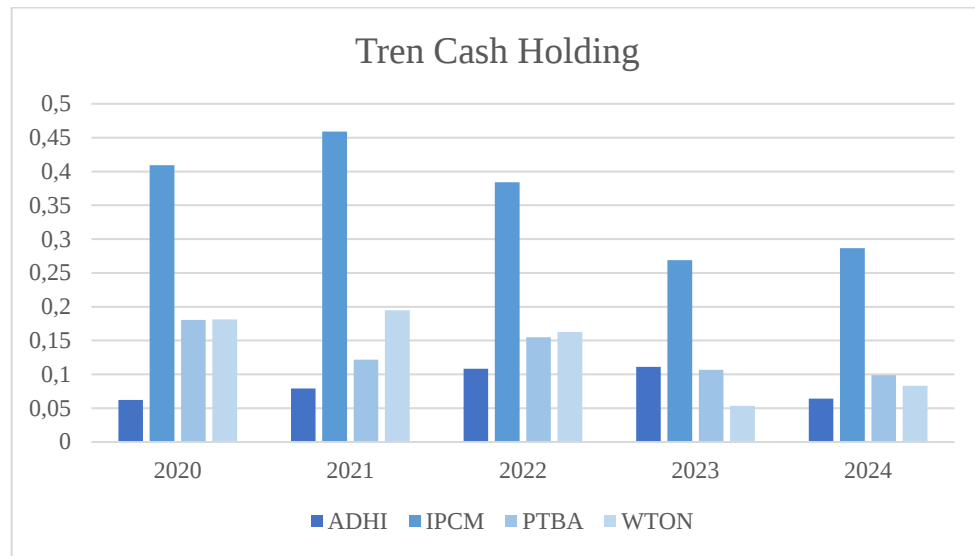
Namun, pada 2024 persentase perusahaan yang melakukan *income smoothing* meningkat kembali menjadi 37%. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan baru dari faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga, inflasi, serta risiko geopolitik. Temuan tersebut menegaskan bahwa praktik *income smoothing* tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, tetapi juga sangat sensitif terhadap dinamika lingkungan ekonomi yang lebih luas.

Praktik *income smoothing* tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan internal perusahaan. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang dapat mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik seperti *income smoothing*. Manajemen yang memiliki informasi lebih lengkap tentang kondisi perusahaan (*information asymmetry*) dapat memanfaatkan posisinya untuk mengatur laba yang dilaporkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Gama *et al.*, 2024).

Beberapa faktor internal yang sering dikaitkan dengan praktik *income smoothing* meliputi *cash holding*, *firm size*, dan *financial leverage*. Ketiga faktor ini dipilih dalam penelitian ini karena memiliki landasan teoretis yang kuat dan telah banyak diteliti dengan hasil yang beragam, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya dalam konteks perusahaan BUMN di Indonesia.

Cash holding mencerminkan jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional maupun menghadapi ketidakpastian ekonomi (Angreni & Miftah, 2025). *Cash holding* menggambarkan kas yang ditahan dan dipandang sebagai aset paling berharga dan likuid yang dapat diambil alih oleh manajer pengendali dari perusahaan di bawah kendali mereka. Tingginya kas yang dimiliki memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan kebijakan keuangan, termasuk dalam pelaporan laba (Alisa *et al.*, 2024). Berdasarkan teori keagenan, manajer dengan kontrol atas kas besar memiliki potensi untuk bertindak oportunistik, salah satunya dengan melakukan *income smoothing* untuk menjaga citra perusahaan di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Toni *et al.*, 2021:5).

Menurut penelitian Bates *et al.*, (2020) perusahaan dengan *cash holding* tinggi memiliki *agency cost* yang lebih besar karena manajemen memiliki diskresi yang lebih luas dalam menggunakan kas tersebut, termasuk untuk kepentingan perataan laba. Penelitian ini menemukan bahwa nilai kas perusahaan telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, yang sebagian disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian arus kas dan meningkatnya kebutuhan untuk fleksibilitas keuangan. Pada konteks perusahaan BUMN, beberapa perusahaan diidentifikasi memiliki nilai *cash holding* yang cenderung mengalami peningkatan selama periode penelitian:



Sumber : BEI (2024), data diolah penulis

Gambar 1.1

Tren Rata-Rata *Cash holding* Perusahaan BUMN di BEI Periode 2020-2024

Grafik menunjukkan bahwa tren *cash holding* pada empat perusahaan BUMN selama periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang bervariasi dan cenderung fluktuatif. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mencatatkan rasio *cash holding* tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya, yaitu sekitar 0,41 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,46 pada tahun 2021, yang menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan yang kuat. Namun, rasio tersebut kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,39 pada tahun 2022 dan 0,27 pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat kembali menjadi sekitar 0,29 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya penggunaan kas untuk aktivitas operasional maupun investasi. Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rasio *cash holding* sekitar 0,18 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 0,12 pada tahun 2021, meningkat kembali pada 2022 sebesar 0,15, dan kembali menurun

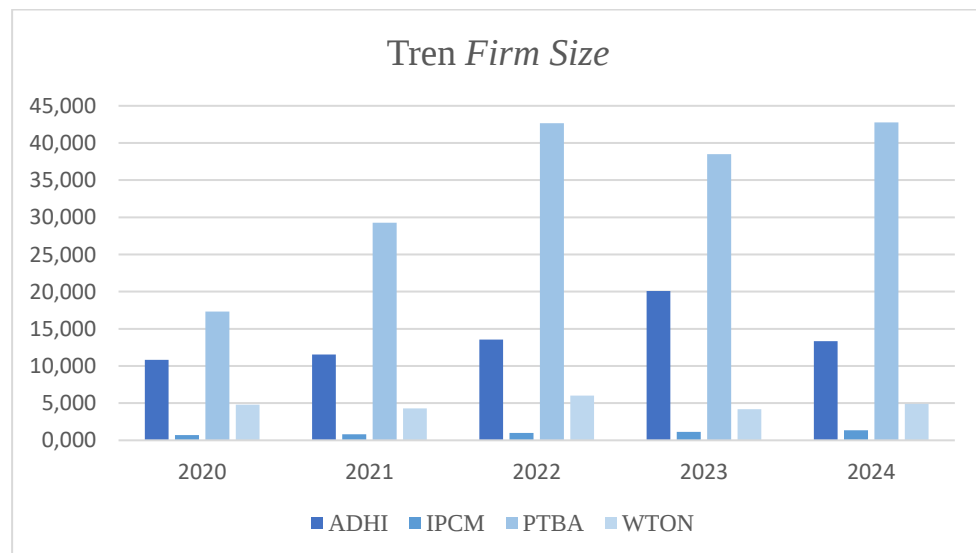
hingga sekitar 0,10 pada tahun 2024, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika industri pertambangan dan kebutuhan investasi perusahaan.

Di sisi lain, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menunjukkan rasio *cash holding* yang relatif lebih rendah namun sempat mengalami peningkatan dari sekitar 0,06 pada tahun 2020 menjadi sekitar 0,11 pada tahun 2022–2023, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi sekitar 0,07, yang mencerminkan penggunaan kas untuk pembiayaan proyek dan kebutuhan operasional perusahaan konstruksi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) memperlihatkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari sekitar 0,18 pada tahun 2020 dan 0,20 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi sekitar 0,16 pada tahun 2022 dan 0,05 pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi sekitar 0,08 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, perbedaan tingkat *cash holding* antarperusahaan ini mencerminkan variasi strategi pengelolaan kas, kebutuhan operasional, serta karakteristik industri masing-masing perusahaan.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi praktik *income smoothing* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI yaitu *firm size* atau ukuran perusahaan. *firm size* diartikan sebagai suatu ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, nilai pasar saham, atau kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Leni, 2024). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dihitung dari jumlah total penjualan, mengikuti pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan.

Seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, kompleksitas operasional dan tingkat perhatian publik juga meningkat. Oleh karena itu, manajemen berupaya

menghindari ketidakstabilan laba untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari dampak negatif dari persaingan pasar, dengan menerapkan berbagai strategi salah satunya dengan perataan laba (Hasanah *et al.*, 2024). Perusahaan BUMN umumnya memiliki total penjualan yang besar yang mencerminkan tingginya permintaan terhadap produk atau jasa perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki daya saing yang kuat di pasar. Selain itu, penjualan yang tinggi juga dapat mengindikasikan kinerja operasional dan strategi pemasaran yang efektif (Nurdin & Cahyono, 2020).



Sumber : BEI (2024), data diolah penulis

Gambar 1.2
Tren Rata-Rata *Firm size* Perusahaan BUMN di BEI Periode 2020-2024
(Dalam Triliun Rupiah)

Grafik menunjukkan bahwa tren *firm size* pada empat perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang cenderung fluktuatif. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan nilai *firm size* tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya sepanjang periode penelitian. Nilainya berada pada kisaran sekitar Rp 17,325 triliun pada tahun 2020, kemudian meningkat

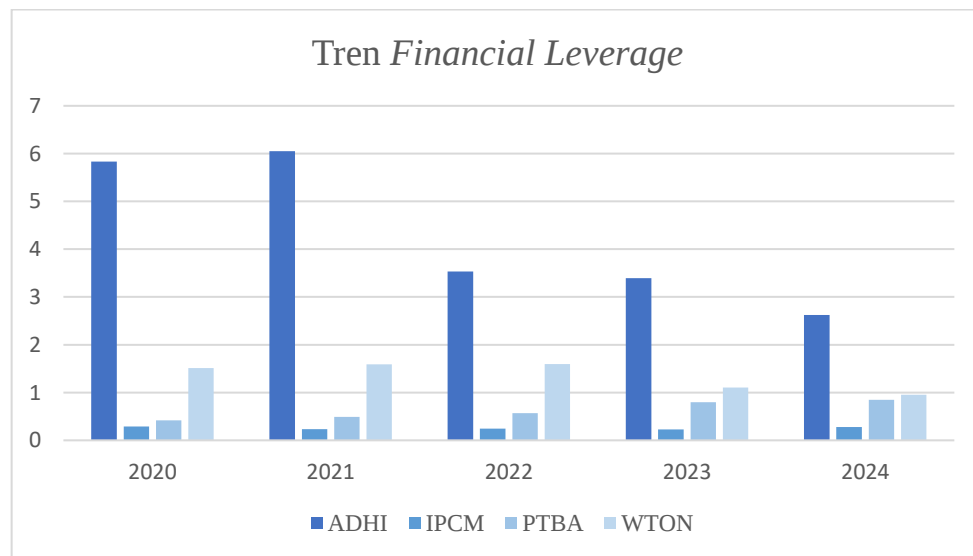
menjadi sekitar Rp 29,261 triliun pada tahun 2021 dan kembali naik hingga sekitar Rp 42,648 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai tersebut sedikit menurun menjadi sekitar Rp 38,488 triliun, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 hingga sekitar Rp 42,764 triliun, yang menunjukkan bahwa skala aset perusahaan relatif besar dan cenderung mengalami pertumbuhan.

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menunjukkan tren yang fluktuatif, dari sekitar Rp 10,828 triliun pada tahun 2020, meningkat hingga sekitar Rp 13,548 triliun pada tahun 2022, kemudian mencapai sekitar Rp. 20,073 triliun pada tahun 2023 sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp. 13,351 triliun. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) memiliki nilai *firm size* yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi pada kisaran Rp 4,203 triliun – Rp 6,003 triliun selama periode penelitian. Di sisi lain, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mencatatkan nilai *firm size* paling rendah dan cenderung stabil di kisaran sekitar Rp 696 miliar – Rp 1.345 triliun dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023–2024. Secara keseluruhan, perbedaan nilai *firm size* tersebut mencerminkan variasi skala aset dan operasional masing-masing perusahaan selama periode pengamatan.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi praktik *income smoothing* adalah *financial leverage*, yaitu tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. *Financial leverage* adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, atau berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya (Purwaningsih & Wanan, 2022:49). Dalam penelitian ini, *financial leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mengukur proporsi total utang terhadap total ekuitas.

Perusahaan dengan tingkat *financial leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok pinjaman, sehingga menghadapi tekanan dari pihak kreditor untuk menjaga stabilitas laba (Sesilia *et al.*, 2021). Dalam situasi seperti itu, manajemen cenderung melakukan *income smoothing* agar terlihat mampu memenuhi kewajiban dan mempertahankan kepercayaan kreditor. Semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*), semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran tersebut atau renegosiasi yang merugikan (Maris *et al.*, 2025).

Dalam konteks perusahaan BUMN, *financial leverage* menjadi faktor sangat penting karena banyak BUMN menggunakan utang sebagai sumber utama pendanaan proyek besar, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan konstruksi. Perusahaan BUMN seringkali mendapat jaminan atau dukungan dari pemerintah (*government guarantee*), sehingga mereka memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta. Hal ini menyebabkan rasio *financial leverage* pada perusahaan BUMN cukup tinggi, karena beberapa diantaranya mengandalkan utang untuk ekspansi bisnis dan pembangunan proyek strategis nasional (Nurdin & Cahyono, 2020).



Sumber : BEI (2024), data diolah penulis

Gambar 1.3

Tren Rata-Rata *Financial leverage* Perusahaan BUMN di BEI Periode 2020–2024

Grafik menunjukkan bahwa tren *financial leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) keempat perusahaan BUMN selama periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang bervariasi dengan kecenderungan penurunan pada sebagian besar perusahaan. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memiliki tingkat *financial leverage* tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya pada sebagian besar periode penelitian. Nilainya berada pada kisaran sekitar 5,9 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi sekitar 6,1 pada tahun 2021, kemudian menurun cukup signifikan menjadi sekitar 3,5 pada tahun 2022 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sekitar 2,6. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan pengurangan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan.

Sementara itu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) menunjukkan nilai *financial leverage* yang relatif rendah namun cenderung meningkat secara bertahap dari sekitar 0,29 pada tahun 2020 hingga sekitar 0,28 pada tahun 2024. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memiliki nilai *financial leverage* yang juga relatif rendah tetapi menunjukkan tren peningkatan dari sekitar 0,4 pada tahun 2020 menjadi sekitar 0,9 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Di sisi lain, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menunjukkan nilai *financial leverage* yang relatif lebih tinggi dibanding IPCM dan PTBA, yaitu sekitar 1,5 pada tahun 2020 dan meningkat hingga sekitar 1,6 pada tahun 2021–2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023–2024. Secara keseluruhan, perbedaan tingkat *financial leverage* ini mencerminkan variasi kebijakan pendanaan serta tingkat penggunaan utang dalam struktur modal masing-masing perusahaan.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan pendanaan perusahaan BUMN yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan pendanaan proyek strategis. Ketika tingkat utang perusahaan tinggi, maka rasio *financial leverage* juga akan meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko finansial. Peningkatan risiko ini seringkali mendorong manajemen untuk melakukan perataan laba untuk menciptakan persepsi stabilitas finansial di mata investor dan kreditor (S. Hasanah *et al.*, 2024).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil (*research gap*) yang ditemukan dalam penelitian mengenai pengaruh *cash holding*, *firm size*, dan *financial leverage* terhadap praktik perataan laba. Inkonsistensi hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) perbedaan periode

penelitian yang mencerminkan kondisi ekonomi yang berbeda; (2) perbedaan karakteristik sampel penelitian seperti sektor industri, ukuran perusahaan, atau status kepemilikan; (3) perbedaan metode pengukuran variabel dan teknik analisis data yang digunakan; (4) perbedaan konteks geografis dan regulasi yang berlaku.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *cash holding*, *firm size*, dan *financial leverage* dengan praktik *income smoothing* belum sepenuhnya dipahami dan memerlukan investigasi lebih lanjut, terutama dalam konteks yang lebih spesifik seperti perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengklarifikasi hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut dan mengidentifikasi kondisi-kondisi spesifik yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana karakteristik keuangan seperti *cash holding*, *firm size*, dan *financial leverage* dapat memengaruhi praktik *income smoothing* pada BUMN yang memiliki struktur keagenan unik, yakni hubungan antara manajemen, pemegang saham publik, dan pemerintah. Penelitian ini dipilih karena masih terbatasnya kajian mengenai *earnings management* dalam konteks perusahaan milik negara di Indonesia, sehingga hasilnya diharapkan dapat memperkaya teori keagenan dan literatur akuntansi terkait perilaku oportunistik manajemen pada entitas dengan kontrol mayoritas pemerintah.

Dari sisi praktis, penelitian ini penting karena dapat memberikan manfaat langsung bagi investor, auditor, dan manajemen BUMN. Investor membutuhkan

pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor keuangan yang berpotensi menjadi pengukuran awal praktik perataan laba, sehingga keputusan investasi dapat dibuat secara lebih akurat. Auditor dan komite audit juga membutuhkan referensi empiris untuk menetapkan area audit yang lebih *risk-based*, sementara manajemen BUMN dapat menggunakan temuan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan. Alasan inilah yang membuat topik ini relevan untuk diteliti, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi BUMN.

Dari sisi kebijakan, peneliti memilih judul ini karena praktik *income smoothing* pada BUMN memiliki implikasi besar terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Dengan kontribusi dividen BUMN yang signifikan terhadap APBN serta peran strategis BUMN dalam sektor-sektor utama, kualitas pelaporan keuangan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pengawasan dan *governance* BUMN serta untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menganalisis pengaruh *cash holding*, *firm size*, dan *financial leverage* terhadap praktik *income smoothing* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut mencakup kondisi ekonomi yang dinamis, mulai dari pandemi COVID-19 (2020-2021), pemulihan ekonomi (2022-2023), hingga kondisi normalisasi ekonomi (2024), sehingga dapat memberikan gambaran

yang komprehensif tentang praktik *income smoothing* dalam berbagai kondisi ekonomi.

Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Cash holding*, *Firm size*, dan *Financial leverage* terhadap Praktik *Income smoothing* (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Cash holding*, *Firm size*, *Financial leverage*, dan *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Cash holding*, *Firm size*, dan *Financial leverage* Terhadap Praktik *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh *Cash holding*, *Firm size*, dan *Financial leverage* Terhadap Praktik *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 secara parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Cash holding*, *Firm size*, *Financial leverage*, dan *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Cash holding* terhadap praktik *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Firm size* terhadap praktik *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financial leverage* terhadap praktik *Income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Cash holding*, *Firm size*, dan *Financial leverage* secara simultan terhadap praktik *income smoothing* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Bagi Manajemen Perusahaan BUMN

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam mengelola keuangan secara optimal, khususnya terkait kebijakan *Cash holding*, *Firm size*, dan *Financial leverage*. Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta

membantu menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik *Income smoothing* dan faktor-faktor yang memengaruhinya, sekaligus mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta integritas penulis sebagai calon profesional di bidang akuntansi.

3. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini menjadi dasar dalam menilai kualitas laba dan risiko keuangan perusahaan. Bagi investor, temuan ini membantu mengidentifikasi potensi manipulasi laba yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan penilaian kinerja jangka panjang perusahaan. Sementara itu, bagi kreditor, penelitian ini bermanfaat untuk menilai tingkat risiko kredit dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Income smoothing*, khususnya dalam konteks perusahaan BUMN di Indonesia.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

serta laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan selama periode 2020–2024.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, terhitung pada bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juli 2026. Waktu penelitian dirincikan pada tabel waktu penelitian yang disajikan dalam lampiran 01.